

LAPORAN PENELITIAN

STUDI KUALITATIF PERSEPSI PENYELENGGARA GEREJA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ISAK 35



Oleh:

Yusni Warastuti, MSi	0627067601
Clara Susilawati, MSi	0612087201
Dr. Sansaloni Butar-Butar, MSi	0605076901
Dr. Monika Palupi M, MSi	0615117301

**PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

Abstrak

Gereja sebagai salah satu entitas berorientasi nonlaba secara finansial menerima sumbangan dari umat/jemaat untuk mendanai aktivitas pelayannya. Ciri dari entitas berorientasi nonlaba para penyumbang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomik yang sebanding dengan yang telah disumbangkannya. Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan posisi gereja sebagai suatu entitas yang memiliki kontrak sosial dengan umat, yaitu bagaimana gereja dalam hal ini pengelola gereja dapat memberikan pelayanan gerejani yang menumbuhkan dan memelihara iman dan kepercayaan umat melalui seluruh aktivitasnya. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 sebagai pengganti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 45 merupakan pedoman bagi entitas berorientasi nonlaba untuk melakukan penyajian laporan keuangan bagi para pengguna. Ketersediaan informasi yang bermanfaat dan pemahaman mengenai laporan keuangan memiliki peran penting pada seberapa banyak pengguna mampu membaca laporan keuangan sekaligus memahami aturan pelaporannya. Berdasarkan kondisi ini maka penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman pengelola gereja atas komponen laporan keuangan yang harus disajikan dan juga kebermanfaatan dari laporan yang telah disajikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan *in depth interview* sehingga dapat memperoleh informasi yang mendalam dari informan. Informan penelitian ini terdiri dari lima orang yang terdiri dari dua orang Pastor Kepala, dua orang bendahara, dan satu orang majelis. Teknik analisis dalam penelitian ini setelah melakukan wawancara dilakukan transkripsi data wawancara; dan selanjutnya dilakukan deskripsi serta interpretasi atas data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan masih menggunakan PSAK 45 karena memang otoritas gereja yang lebih tinggi belum melakukan penyesuaian pedoman ini. Hasil lain yaitu pemahaman mengenai keberadaan ISAK 35 dari para bendahara paroki lebih baik daripada para pastor kepala karena bendahara paroki yang menjadi informan penelitian berpendidikan akuntansi dan bekerja pada bidang akuntansi dan kantor akuntan publik. Alasan lain yaitu bendahara sebagai pihak yang menyediakan informasi sedangkan pastor kepala merupakan pengguna informasi. Laporan keuangan yang saat ini tersedia yaitu laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas sudah cukup digunakan untuk dasar pengelolaan gereja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan. Ketiadaan laporan arus kas tidak membuat informan merasa kekurangan informasi.

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Judul | : Studi Kualitatif Perspektif Penyelenggara Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK 45 |
| 2. Ketua Tim | |
| a. Nama | : YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si. |
| b. NPP | : 5811999224 |
| c. Program Studi | : Akuntansi |
| d. Perguruan Tinggi | : Unika Soegijapranata |
| e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel | : yusni@unika.ac.id |
| 3. Anggota Tim | |
| a. Jumlah Anggota | : Dosen 4 orang
Mahasiswa 0 orang |
| 4. Biaya Total | : Rp. 3.180.000,00 |

Mengetahui,
Dekan Ekonomi,

Semarang, Januari 2021
Ketua Tim Pengusul

YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.
NPP : 5811999224

YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.
NPP : 5811999224

Menyetujui,
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.

Anggota Dosen:

[5811995190]CLARA SUSILAWATI, SE, M.Si, [5811998211]Dr. MONICA PALUPI M., S.E., M.M.,
[5811999224]YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si., [5812002251]Dr SANSALONI BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Akuntansi - Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 26 Oktober 2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

Studi Kualitatif Perspektif Penyelenggara Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK 45

Dengan catatan review sebagai berikut:

- mohon dilihat pada dokumen 1. latar belakang masalah, kaitan dengan kontribusi penelitian 2. Tambahkan teori untuk fenomena yang akan diteliti 3. Cek kembali fakta-fakta mengenai implementasi sistem akuntansi gereja 4. Cek metodologi
- Hello tim. Sebagai awal penelitian kualitatif, sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang masih harus ditambahkan dalam penelitian ini untuk bisa menjadi "theorised storyline". Silahkan ditambahkan jika memungkinkan. Komentar ada di draft review yang saya sertakan disini.Tk
- Dalam Berita Acara

Reviewer 1

Reviewer 2

ST. VENA PURNAMASARI, S.E., M.Si.

LINGGAR YEKTI NUGRAHENI, S.E.,
M.Comm.Ph. D



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'

- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah

- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Judul	i
Abstraksi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
2.1. Teori Legitimasi	7
2.2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35).....	9
2.3. Penelitian Terdahulu	14
BAB III. METODE PENELITIAN	16
3.1. Pendekatan Fenomologi	16
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian	18
3.3. Sampel	18
3.4. Sumber Data	20
3.5. Teknik Analisis Data	21
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Gambaran Informan	23
4.2. Persepsi Informan Mengenai ISAK 35	24
4.2.1. Persepsi informan terhadap komponen dan kebermanfaatan laporan posisi keuangan	30

4.2.2. Persepsi informan terhadap komponen dan kebermanfaatan laporan pendapatan komprehensif	35
4.2.3. Persepsi informan terhadap komponen dan kebermanfaatan laporan arus kas	40
4.2.4. Kebermanfaatan laporan keuangan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan	42
4.3. Pembahasan	45
4.3.1. Keberadaan ISAK 35	47
4.3.2. Laporan Posisi Keuangan	48
4.3.3. Laporan Penghasilan Komprehensif	49
4.3.4. Laporan Arus Kas	50
4.3.5. Kebermanfaatan Laporan Keuangan	51
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	52
5.1. Simpulan	52
5.2. Implikasi dan Saran	53
Status Luaran	55
Kendala Pelaksanaan Penelitian	55
Rencana Tindak Lanjut Penelitian.....	56
Daftar Pustaka	57
Jadwal	60
Anggaran	61
Daftar Pertanyaan	62
Surat Tugas	64

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 2.1. Perbandingan PSAK 45 dan ISAK 35	9
Tabel 3.1. Data Informan Penelitian	21
Tabel 4.1. Pengkodean Komponen Laporan Posisi Keuangan	32
Tabel 4.2. Pengkodean Kebermanfaatan Laporan Posisi Keuangan	34
Tabel 4.3. Pengkodean Komponen Laporan Pendapatan Komprehensif	36
Tabel 4.2. Pengkodean Kebermanfaatan Laporan Pendapatan Komprehensif	38
Tabel 4.5. Pengkodean Komponen Laporan Arus Kas	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tata kelola keuangan organisasi non laba, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang menjadi bagian Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar pelaporan keuangan PSAK 45 khusus untuk organisasi non laba pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian direvisi tahun 2011 dan yang terakhir direvisi lagi tahun 2019. Pada tanggal 11 April 2019, DSAK mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba berlaku efektif untuk tahun buku per 1 Januari 2020. ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 juga dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35 (<http://iaiglobal.or.id/>).

Menurut ISAK 35, pengguna laporan keuangan entitas berorientasi non laba memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi non laba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Seluruh entitas berorientasi non laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut diwajibkan untuk menggunakan ISAK 35 sebagai dasar penyajian laporan keuangan. ISAK 35 juga berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Interpretasi ini diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Lebih jauh, ISAK 35 menjelaskan bahwa entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Entitas berorientasi non laba juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Entitas berorientasi non laba tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk

catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mempertimbangkan bahwa perbedaan utama antara entitas berorientasi non laba dan entitas bisnis berorientasi laba adalah cara entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Oleh karena itu, konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk hal-hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK atau SAK ETAP.

Gereja sebagai salah satu bentuk entitas yang berorientasi non laba juga menjadi sasaran dari ISAK 35 karena memperoleh pendanaan atau sumber daya dari jemaat/umat yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomik yang sebanding dengan sumber daya yang telah diberikan. Gereja juga bisa memperoleh pendanaan dari pihak lain yang berwujud pinjaman dari penyelenggara gereja pada tingkat yang lebih tinggi, namun dalam ketentuan pinjaman juga berbeda dengan entitas yang berorientasi laba. Lebih jauh lagi para donatur gereja atau pihak lainnya yang memberi sumbangan secara rutin kepada gereja memiliki perspektif yang berbeda dengan donatur organisasi non laba lainnya. Belum tentu mereka memiliki keinginan yang sama seperti para donatur di organisasi non laba lainnya untuk mengetahui bagaimana cara gereja mengalokasikan dana yang telah mereka sumbangkan. Sebagai umat beriman mereka tidak memandang uang yang mereka sumbangkan ke gereja sebagai

sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi kelanjutannya. Jemaat gereja menganggap sumbangan tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang berdampak pada kehidupan kekal sesuai dengan yang mereka percayai.

Apabila jemaat dan donatur gereja tidak lagi mempertanyakan kelanjutan dari sumbangan yang mereka berikan maka patut diduga bahwa mereka juga tidak mempertanyakan efisiensi dan keefektifan penyelenggara gereja dalam menggunakan uang yang mereka sumbangkan. Dalam konteks seperti ini sulit untuk menerima asumsi yang melandasi ISAK 35 bahwa para penyedia dana gereja juga berkepentingan untuk memastikan sumbangan mereka telah dikelola dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif dan produktif. Dalam situasi seperti ini, pihak penyelenggara gereja mungkin merasa tidak perlu untuk mengadopsi ISAK 35 dalam melaporkan aktivitas sosial yang mereka jalankan. Akibatnya, pengadopsian ISAK 35 di kalangan gereja berjalan lambat atau belum sama sekali.

Berkaitan dengan penerapan ISAK 35 baru berlaku efektif pada 1 Januari 2020, maka riset-riset pendahulu yang digunakan masih menggunakan PSAK 45. Beberapa penelitian sebelumnya dengan obyek riset entitas yang berorientasi nonlaba yaitu masjid, gereja katolik dan gereja kristen diantaranya Divina dkk (2020), Munte dan Rahmah (2019), Putri (2018) dan Randa (2011). Secara umum penelitian sebelumnya melakukan analisis deskriptif kualitatif mengenai penerapan PSAK dan kemudian melakukan proses penyesuaian pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 45.

Studi awal yang dilakukan di beberapa gereja katolik dan protestan di kota Semarang menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 masih belum dilakukan

sepenuhnya dan bahkan di beberapa gereja belum diterapkan sama sekali. Patut diduga bahwa keengganan untuk mengadopsi ISAK 35 secara penuh didorong oleh pemahaman yang kurang lengkap tentang hakikat dan manfaat laporan keuangan bagi organisasi non laba seperti gereja. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan-pandangan pihak-pihak penyelenggara gereja katolik dan gereja protestan mengenai penyajian laporan keuangan berbasis ISAK 35 yang sudah berlaku efektif 1 Januari 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif untuk menangkap perasaan, motivasi, cara pandang, nilai-nilai yang diyakini penyelenggara administrasi dan keuangan gereja tentang kebermanfaatan pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 35 untuk menjawab masalah penelitian yang terkait dengan lambatnya pengadopsian standar tersebut di kalangan gereja. Berangkat dari masalah penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan riset yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai *stakeholder* mempersepsikan pelaporan keuangan organisasi non laba berbasis ISAK 35?
2. Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai *stakeholder* mempersepsikan laporan posisi keuangan seperti yang disyaratkan ISAK 35?

3. Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai *stakeholder* mempersepsikan laporan penghasilan komprehensif (laporan aktivitas/PSAK45) seperti yang disyaratkan ISAK 35?
4. Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai *stakeholder* mempersepsikan laporan arus kas seperti yang disyaratkan ISAK 35?
5. Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai *stakeholder* mempersepsikan kebermanfaatan pelaporan keuangan organisasi non laba seperti yang disyaratkan ISAK 35?

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Legitimasi

Suchman (1995, p. 574) dalam Burlea (2013) berpendapat bahwa “Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi”. Dalam konsepsi ini, teori legitimasi adalah mekanisme yang mendukung organisasi dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan lingkungan untuk memenuhi kontrak sosial mereka yang memungkinkan pengakuan tujuan mereka dan kelangsungan hidup di lingkungan. Persepsi sosial dari kegiatan organisasi diungkapkan kepada masyarakat. Dalam situasi ketika kegiatan organisasi tidak menghormati nilai-nilai moral, organisasi sangat disetujui oleh masyarakat; sanksi ini bahkan dapat menyebabkan kegagalan organisasi. Organisasi harus menjustifikasi keberadaannya melalui tindakan ekonomi dan sosial yang sah yang tidak membahayakan keberadaan masyarakat di mana perusahaan berada.

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dapat mengubah persepsi masyarakat tentang perusahaan. Oleh karena itu, sementara teori agenda setting media berpendapat bahwa media massa dapat membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu tertentu, teori legitimasi memberikan argumen yang konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan juga dapat mempengaruhi

persepsi masyarakat melalui praktik pengungkapan mereka. Teori legitimasi yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat menyatakan bahwa organisasi terus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan *et al.*, 2002).

Meyer dan Rowan (1977) dalam Aziza (2014) berargumen: Organisasi mengintegrasikan elemen rasional yang dilegitimasi secara sosial dalam struktur formal mereka untuk memaksimalkan sumber daya dan kemampuan bertahan hidup mereka, terlepas dari efisiensi produktif mereka, organisasi yang ada di lingkungan kelembagaan yang sangat rumit dan berhasil menjadi isomorfik dengan lingkungan ini mendapatkan legitimasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan. Sebuah organisasi akan bertahan jika jasa yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Shocker dan Sethi (1973) meskipun bisnis terus membenarkan legitimasi dan relevansinya dengan masyarakat atas dasar kriteria tradisional, banyak kelompok masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan dengan kinerja bisnis dalam memenuhi kebutuhan dan harapan sosial yang berubah. Ketidakpuasan ini, baik berdasarkan informasi yang valid atau tidak, tersebar luas dan persisten.

Berdasarkan teori legitimasi ini maka setiap entitas perlu untuk memberikan informasi kepada semua pihak mengenai kondisi entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban; tidak terkecuali entitas berorientasi non laba. Bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil

keputusan. Agar informasi yang disajikan dapat berguna untuk pengambilan keputusan maka informasi tersebut harus relevan dan dapat mempresentasikan secara tepat apa yang direpresentasikan.

2.2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35)

Pada awalnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan PSAK 45 tentang pelaporan entitas nirlaba. PSAK 45 khusus untuk organisasi non laba diterbitkan pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian direvisi tahun 2011. Pada 11 April 2019, DSAK mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba berlaku efektif untuk tahun buku per 1 Januari 2020, yang berarti bahwa PSAK 45 tidak berlaku lagi.

Perbedaan antara PSAK 45 dengan ISAK 35 menurut Gustani (2021), dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Perbandingan PSAK 45 dan ISAK 35

No	Item Pembeda	PSAK 45	ISAK 35
1	Klasifikasi aset netto	Dibagi menjadi 3: - tidak terikat - terikat temporer - terikat permanen	Dibagi menjadi 2: - dengan pembatasan - tanpa pembatasan
2	Judul laporan keuangan	Laporan aktivitas, berisi informasi pendapatan dikurangi dengan beban = surplus/defisit tahun berjalan, kemudian ditambah dengan saldo awal menjadi saldo akhir	Laporan penghasilan komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus/defisit tahun berjalan
3	Laporan perubahan aset netto	Hanya sebagai alternatif	Merupakan bagian dari jenis laporan keuangan entitas non laba
4	Penghasilan komprehensif lain	-	Diakomodasi untuk disajikan

5	Jenis laporan keuangan	Ada 4: a. laporan posisi keuangan b. laporan aktivitas c. laporan arus kas d. catatan atas laporan keuangan	Ada 5: a. laporan posisi keuangan b. laporan penghasilan komprehensif c. Laporan perubahan aset neto d. laporan arus kas e. catatan atas laporan keuangan
---	------------------------	---	--

Disarikan dari: <https://www.gustani.id/2021>

ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan berorientasi nonlaba. ISAK 35 berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 (PSAK No 1) tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK No 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, maka jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu penyesuaian deskripsi. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non laba. Entitas non laba dapat menggunakan akun dan nama laporan yang berbeda tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan PSAK 1.

Karakteristik entitas berorientasi non laba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi non laba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

ISAK 35 memberikan kewenangan entitas untuk menilai sendiri apakah entitas tersebut merupakan entitas yang berorientasi non laba terlepas dari bentuk

badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. ISAK
Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah:

- a. Apakah sumber daya entitas berorientasi non laba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi non laba tersebut;
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non laba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non laba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non laba.

Laporan keuangan untuk entitas berorientasi non laba berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas berorientasi laba. PSAK 1 ada empat komponen laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan entitas berorientasi non laba terdiri dari lima komponen yaitu: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan non laba adalah menyediakan informasi bagi para penyumbang, anggota entitas berorientasi non laba, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas berorientasi non laba. Entitas berorientasi non laba perlu menyusun 5 jenis laporan keuangan sesuai ISAK 35 yaitu:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan pada entitas non laba bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemberian jasa/layanan entitas berorientasi yang berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan pendanaan eksternal. Terdapat 2 (dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ini. Setiap format memiliki keunggulan. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya; atau Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

2. Laporan penghasilan komprehensif

Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menggunakan judul lain sepanjang penggunaan judul lain mampu mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya. Untuk laporan penghasilan komprehensif ada dua format, dengan keunggulan masing-masing:

- a. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan secara komparatif. Untuk format

ini pengelompokkan aset neto tanpa dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya disajikan terpisah dengan posisi atas bawah.

- b. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto, yang berarti bahwa pendapatan dan biaya dikelompokkan/disajikan dalam kolom yang berbeda untuk aset neto tanpa dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto ini menyajikan aset neto pada awal periode, surplus atau defisit periode berjalan, dan saldo akhir periode. Entitas dapat menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan aset netonya sesuai dengan format laporan posisi keuangan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Tiga aktivitas dalam laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan informasi posisi kas pada awal dan akhir periode untuk akun kas dan setara kas.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan atas apa yang disajikan di laporan keuangan dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang ada.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian terkait dengan penyajian laporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian yang Diviana, dkk (2020) meneliti tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Baitul Haadi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 dengan alat bantu aplikasi Microsoft Excel. Laporan yang dihasilkan berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Munte dan Rahmah (2019) dalam risetnya bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 45 pada salah satu organisasi non profit yaitu gereja HKBP Maranatha di Rawalumbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan gereja HKBP Maranatha hanya kas masuk dan keluar dan laporan ini oleh pihak disebut sebagai laporan neraca kas sehingga laporan keuangan yang ada di gereja ini belum sesuai dengan PSAK 45. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penyempurnaan laporan yang telah ada menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45.

Penelitian Putri (2018) menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk melihat penerapan PSAK 45 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kertanegara Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gereja belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan dalam PSAK 45. Gereja tidak menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Gereja hanya menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan realisasi keuangan berdasarkan pedoman yang disusun oleh gereja, meskipun demikian secara garis besar tujuan penyusunan laporan keuangan gereja telah tercapai.

Randa (2011) meneliti akuntabilitas stasi dan gereja paroki di Tana Toraja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari stasi dilakukan dengan cara diumumkan pada setiap minggu. Untuk gereja paroki laporan keuangan yang diharapkan disajikan yaitu anggaran, laporan neraca, laporan penerimaan dan beban, realisasi anggaran, daftar inventaris, laporan arus kas, dan laporan dana yang dibatasi penggunaannya; namun proses pelaporan belum bisa dijalankan dengan alasan pedoman yang diberikan keuskupan terlalu sulit untuk dijalankan. Yang sudah dilakukan yaitu telah mengumumkan penerimaan pada setiap minggu tetapi tidak diikuti dengan informasi penggunaan dana dan saldo akhir kas yang ada di paroki.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Fenomenologi

Untuk memahami lebih mendalam apa yang dirasakan, dipersepsikan, dan dimengerti orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi dan keuangan gereja terhadap pelaporan keuangan berbasis ISAK 35, peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dan mengetahui penyelenggaraan gereja dan melakukan wawancara secara terbuka secara objektif. Karena itu, pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam riset kualitatif untuk menginvestigasi pendapat dan persepsi informan terhadap suatu kondisi atau fenomena tertentu tanpa ada manipulasi (netral) (Fraenkel et al., 2012). Artinya, pada pendekatan ini peneliti mendeskripsikan fenomena tertentu menurut perspektif informan yang beragam dan memahami perspektif tersebut secara menyeluruh untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang diteliti (Hilal dan Alabri, 2013).

Peneliti memperoleh data melalui observasi dan wawancara, misalnya dengan *in depth interview* mengenai persepsi terhadap suatu fenomena tertentu. Hasil pengumpulan data dalam bentuk kata-kata yang merefleksikan pendapat, motivasi, keyakinan, nilai-nilai dan persepsi informan akan dikelompokkan untuk memberi

makna terhadap data-data tersebut. Pendapat dan persepsi yang sama akan menjadi sebuah karakteristik esensial yang akan diidentifikasi dan dideskripsikan dalam sebuah narasi oleh peneliti.

Kekuatan dari pendekatan fenomenologi adalah kemampuan untuk mendeskripsikan fenomena apa adanya (netral) tanpa memasukkan pemikiran, persepsi atau pendapat peneliti mengenai fenomena yang diteliti (Alase, 2017). Peneliti memposisikan dirinya sebagai pihak yang mengumpulkan pendapat dari informan dan memahami suatu fenomena menurut persepsi informan, sehingga tidak ada manipulasi data. Pendekatan ini juga mendeskripsikan dan memahami suatu fenomena secara utuh dari persepsi para informan dengan variasinya.

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami perspektif penyelenggara gereja terhadap ISAK 35 dengan menggunakan metode fenomenologi. Menurut Frankel, et al. (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami kualitas hubungan, aktivitas, situasi atau material secara holistik dengan mempelajari perilaku, tindakan, motivasi dan nilai-nilai yang diyakini pihak yang menjadi subjek penelitian. Lebih jauh Bog dan Biklen (2007) menjelaskan setidaknya ada lima karakteristik yang menjadi ciri khas penelitian kualitatif: 1) Peneliti kualitatif terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). 2) Data kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. 3) Peneliti kualitatif memperhatikan hasil dan juga proses. 4) Peneliti kualitatif cenderung mengolah data secara induktif. 5) Perhatian utama peneliti kualitatif adalah memahami bagaimana orang merasionalisasi kehidupan mereka.

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah penyelenggara gereja di tingkat paroki dan majelis gereja di Semarang. Paroki merupakan persekutuan umat kristiani di teritori tertentu yang dibentuk secara tetap oleh keuskupan yang reksa pastoralnya di bawah otoritas suatu keuskupan. Sebagai subjek pastoral, Paroki menjadi pelaksana seluruh gerak pastoral dalam berbagai bentuk pelayanan yang mengacu pada gerak pastoral bersama keuskupan. Di samping itu, paroki juga menjadi fokus persekutuan umat beriman yang menjadi arah dan tujuan pastoral keuskupan. Seluruh potensi pelayanan dan program diarahkan untuk kepentingan umat yang masuk dalam suatu paroki. Konsekuensinya, paroki menjadi tempat dimana seluruh aktivitas pastoral terjadi.

3.3. Sampel

Temuan penelitian kualitatif harus ditempatkan sesuai konteks dimana penelitian dilakukan dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi dalam konteks yang lain. Walaupun dalam kasus tertentu, hasil penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena di tempat lain tetapi harus dipastikan bahwa konteks dimana generalisasi dilakukan tidak berbeda jauh dengan konteks semula. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel untuk melakukan generalisasi terhadap populasi penelitian, sampel yang dipilih dalam penelitian kualitatif bersifat unik karena itu pemilihan sampel dilakukan secara

purposive sampling dengan teknik *typical sample*. Peneliti memilih sampel yang dianggap paling memahami tentang fenomena yang sedang diteliti.

Sampel yang dipilih dalam penelitian kualitatif sering disebut dengan informan. Melalui pandangan-pandangan, tindakan, dan nilai-nilai yang diyakini informan, peneliti kualitatif mencoba untuk memahami realitas dari sudut pandang informan. Pemilihan informan ditentukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan dan administrasi gereja. Lebih spesifik informan yang dipilih harus bisa memberikan pandangan-pandangan yang dapat dipercaya, konsisten dan bisa diandalkan atas apa yang dialami selama ini (Miles dan Huberman, 1994). Ini penting untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Informasi yang tidak bisa diandalkan akan mengancam kevaliditasan penelitian.

Pada awalnya, informan yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah para pemegang otoritas dan pengambil keputusan di tingkat gereja yang berjumlah enam orang yaitu satu orang romo ekonom, satu orang wakil ekonom, dua orang karyawan bidang keuangan, dan dua orang karyawan bidang aset. Namun karena pihak ekonomat tidak berkenan untuk terlibat dalam penelitian maka informan dalam penelitian ini adalah pastor kepala dan bendahara paroki dari gereja Katolik, serta majelis gereja yang mengelola keuangan gereja dari Gereja Kristen Jawa (GKJ). Pertimbangan yang mendasari penetapan informan penelitian tersebut adalah bahwa paroki menjadi pelaksana seluruh gerak pastoral dalam berbagai bentuk pelayanan yang mengacu pada gerak pastoral bersama keuskupan. Selain itu, paroki merupakan pihak yang juga mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Informan dalam penelitian ini adalah dua orang pastor kepala dan dua

orang bendahara dari gereja Katolik. Sedangkan dari Gereja Kristen Jawa ditetapkan satu majelis gereja.

3.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data primer tersebut berupa kata-kata yang merefleksikan pandangan, nilai-nilai, motivasi, dan tindakan para informan yang direkam atau dicatat selama wawancara berlangsung. Sasaran yang ingin dicapai pada saat melakukan wawancara adalah merekonstruksi pikiran, perasaan, motivasi, informan tentang laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan seperti yang dimaksud dalam ISAK 45. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap (*ongoing basis*). Peneliti melakukan observasi secara terus menerus sambil melakukan wawancara yang mendalam serta meneliti berbagai dokumen yang relevan dengan fenomena yang menjadi perhatian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang standar (baku). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan cara pengajuannya sama untuk semua informan. Ini penting agar proses rekonstruksi realitas antara dari satu informan ke informan lain dapat dilakukan dengan konsisten sehingga menghasilkan satu rekonstruksi yang komprehensif yang mewakili perspektif informan secara kolektif. Wawancara terbuka dengan pertanyaan baku dapat mengurangi perbedaan-perbedaan atau variasi antara pewawancara satu dengan yang lainnya. Wawancara dilakukan

dalam jaringan (daring) *gmeet* dan melalui luar jaringan (luring), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Teknik Perolehan Data	Kode	Posisi Informan
1	Wawancara daring	A	Bendahara
2	Wawancara luring	B	Pastor Kepala
3	Wawancara luring	C	Bendahara
4	Wawancara luring	D	Pastor Kepala
5	Wawancara luring	E	Bendahara GKJ

3.5. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan teknik pengkodean (*coding*). Menurut Strauss and Corbin (1998) *coding* dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses analitik yang dilakukan terhadap data dalam rangka mengkonseptualisasi dan mengintegrasikan data untuk membentuk teori. Secara umum *coding* merupakan pelabelan dalam upaya memberi makna pada sekumpulan besar data yang berhasil dikumpulkan. Lebih jauh menurut Frankel, et al. (2012) pada saat memberi *coding* terhadap suatu paragraf atau kalimat peneliti mencoba menangkap ide utama yang tersembunyi dibalik kalimat atau paragraf tersebut. Kode dan sub-kode secara terus menerus diperbaiki dan dimurnikan untuk merasionalisasi data melalui kategorisasi dan analisis.

Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses menganalisis, melakukan sintesis, dan mereduksi informasi dari berbagai sumber menjadi deskripsi yang koheren tentang fenomena yang menjadi perhatian (Frankel, 2012). Interpretasi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian

berlangsung. Langkah-langkah untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini dipisahkan menjadi dua, tergantung pada cara memperoleh data. Berikut langkah-langkah untuk analisis untuk data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara:

1. Melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan wawancara dengan informan yang akan dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan selama 60 – 90 menit dan direkam dalam bentuk *audio recording*.
2. Melakukan transkripsi data hasil wawancara. Hasil wawancara berupa data audio (rekaman wawancara)
3. Melakukan deskripsi dan interpretasi pada data yang telah didapatkan. Hasil interpretasi dikaitkan dengan teori yang ada.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Informan

Penelitian menggunakan 5 orang informan yang memiliki peran sebagai pastor kepala paroki, bendahara paroki dan bendahara Gereja Kristen Jawa. Pastor kepala paroki dan majelis merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dan pembuat keputusan terhadap pengelolaan seluruh keuangan paroki/gereja. Sedangkan bendahara adalah pihak yang terlibat aktif dalam proses pelaporan laporan keuangan dan memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan saat pembuatan keputusan.

Adapun detail informan adalah sebagai berikut:

1. Informan A, bendahara aktif paroki Kristus Raja Ungaran yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Informan ini bertugas untuk melakukan inputing bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan. Informan A juga menyatakan bahwa sekali dalam sebulan memiliki tugas mempresentasikan laporan keuangan di dalam rapat dewan harian dan terlibat dalam pemberian informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan rapat dewan harian.
2. Informan B, adalah pastor kepala paroki gereja BSB Semarang yang memiliki latar belakang pendidikan filsafat dan teologi. Informan ini bertanggung jawab

pada penyelenggaraan kegiatan gereja, termasuk dalam hal pelaporan dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

3. Informan C, adalah bendahara aktif di gereja St. Paulus Sendangguwo dan memiliki Pendidikan S1 Akuntansi dan kantor akuntan partner Heliantono dan Rekan.
4. Informan D, seorang pastor kepala paroki Kristus Raja Ungaran yang memiliki latar belakang Pendidikan filsafat dan teologi. Sebagai pastor kepala sekaligus ketua dewan paroki, informan D memiliki tanggung jawab tata kelola harta benda, termasuk pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata pengembalaan, tata kelola administrasi dan tata kelola harta benda.
5. Informan E adalah bendahara Gereja Kristen Jawa yang merangkap sebagai majelis jemaat gereja. Beliau memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi dan keuangan serta bertanggung jawab penuh dalam mengatur keuangan gereja, mulai dari pencatatan pemasukan/pengeluaran hingga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana gereja. Beliau juga telah mengikuti dua kali pelatihan tentang PSAK 45 (standar pelaporan nirlaba sebelum diganti dengan ISAK 35) yang diselenggarakan Sinode GKJ.

4.2. Persepsi Informan mengenai ISAK 35

Bagian ini akan menjelaskan informasi umum yang diperoleh dari informan mengenai ISAK 35 (PSAK 45) dan manfaatnya, pedoman pelaporan keuangan yang digunakan gereja saat ini, jenis dan pengguna laporan keuangan, penerapan

pedoman laporan keuangan dan kendala yang dihadapi oleh gereja dalam implementasi pedoman pelaporan keuangan.

Perlu disampaikan bahwa belum semua informan mengetahui pergantian dari PSAK 45 menjadi ISAK 35, khususnya informan dari Gereja Kristen Jawa. Pergantian terjadi pada saat proposal penelitian sedang dibuat. Fakta bahwa perbedaan PSAK 45 dan ISAK 35 tidak esensial, tim peneliti memandang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tetap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 meliputi hal-hal berikut ini: 1) Pemahaman tentang keberadaan ISAK 35 atau PSAK 45 sebagai standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan non laba. 2) Pemahaman tentang keberadaan pedoman pelaporan keuangan, baik Pedoman Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) atau Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (PPAP). 3) Pemahaman ttg ISAK 35 dan PSAK 45 yang digunakan sebagai dasar penyusunan PTKAP dan PPAP yang merupakan kebijakan penyusunan laporan keuangan KAS. 4) Pemahaman tentang jenis laporan keuangan yang dilaporkan. 5) Berapa lama paroki telah menerapkan pedoman pelaporan dari KAS (khusus gereja Katolik).

Pernyataan para informan mengenai eksistensi PSAK 45 dan ISAK 35 sebagai standar pelaporan bagi entitas non laba, termasuk di dalamnya gereja adalah:

Sepengetahuan saya, PSAK 45 digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan untuk organisasi non profit, termasuk gereja. Untuk ISAK 35, saya baru mendengar sebatas pengganti PSAK 45, tetapi isinya hampir sama. Secara detail belum tahu dan hanya diinformasikan dalam pertemuan kolasi bahwa otoritas gereja menggunakan ISAK 35 tapi kami masih menggunakan pedoman yang sama - (informan A, bendahara paroki -4.2.1)

Saya pernah mendapat penjelasan ketika ada perubahan Undang-Undang Yayasan. Sedikit tahu, kalau PSAK 45 digunakan untuk dasar laporan keuangan organisasi yang tidak berorientasi pada profit. Yayasan termasuk didalamnya, sama juga dengan gereja. ISAK 35, saya tidak tahu hanya pernah mendengar- (informan B, pastor kepala-4.2.2)

PSAK 45 merupakan standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan non profit. Sedangkan ISAK 35 merupakan standar untuk penyusunan laporan keuangan yang menggantikan PSAK 45 dan berlaku mulai tahun 2020, tapi detailnya belum saya pelajari (informan C, bendahara paroki -4.2.3)

Mengetahui PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pengelolaan Harta Benda Gereja – Paroki, 2018, tentang Laporan Keuangan. Mengenai ISAK 35, saya tahu bahwa PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45) dicabut, dan diterapkan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba. Baik tentang PSAK 45 maupun ISAK 35 belum mengetahui secara lengkap dan mendalam (informan D, pastor paroki – 4.2.4)

Saya mengetahui tentang pelaporan keuangan gereja yang disusun berdasarkan PSAK 45 dan telah mengikuti dua kali pelatihan yang diselenggarakan Sinode GKJ. Berkaitan dengan perubahan standar penyusunan laporan keuangan nirlaba dari yang sebelumnya berdasarkan PSAK 45 menjadi ISAK 35 saya belum pernah mendengarnya (Informan E, bendahara GKJ)

Penjelasan mengenai pemahaman eksistensi PSAK 45 dan ISAK 35 para informan mendeskripsikan bahwa informan mengetahui eksistensi PSAK 45 sebagai standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas non laba, sedang keberadaan ISAK 35 diketahui sebagai pengganti PSAK 45, kecuali informan B dan E, tetapi tidak memahami detail perbedaan dari kedua standar tersebut.

Peneliti menelusuri pemahaman para informan dengan mengenai peraturan otoritas gereja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan paroki. Berikut ini adalah pendapat para informan mengenai peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan:

Dalam membuat laporan keuangan, paroki menggunakan sistem pelaporan online yang telah dibuat oleh otoritas gereja, sehingga semua bendahara hanya melakukan input data. Untuk pedoman atau dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, ada PTKAP (Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki) yang dulu digunakan dan sekarang menggunakan PPAP (Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki). Jenis laporan keuangan yang dibuat sama, yaitu neraca, laporan aktivitas dan kalau di paroki ada daftar aset tetap. Laporan arus kas tidak dibuat. (Informan A, bendahara – 4.2.6)

Standar yang dipakai adalah pembuatan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan oleh otoritas gereja, ada PTKAP lalu PPAP. Kuncinya dalam melakukan penyusunan laporan keuangan adalah: benar, ada bukti transaksi, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Informan B, pastor kepala – 4.2.7)

Paroki menggunakan PPAP 2018 untuk dasar menyusun laporan keuangan, tapi pada dasarnya semua proses sudah dikerjakan sistem kecuali input data transaksi. Kelihatannya dasar yang digunakan dalam PPAP ini, PSAK 45. Saya tidak tahu apakah sudah ada pedoman baru yang mengacu pada ISAK 35 (Informan C, bendahara -4.2.8)

Laporan keuangan paroki disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dengan penyesuaian seperlunya untuk kepentingan internal Gereja. Pedoman yang digunakan adalah PPAP 2018. (Informan D, pastor kepala – 4.2.9).

Gereja Kristen Jawa tidak memiliki pedoman khusus dari Sinode gereja yang bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan gereja. Selama ini hanya bersifat himbauan agar gereja mencatat secara tertib pengeluaran dan pemasukan sehingga Sinode Gereja bisa memantau perkembangan gereja dan memberi bantuan kepada gereja yang mengalami kesulitan keuangan. (Informan E, bendahara GKJ)

Berdasarkan pernyataan para informan, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa otoritas gereja (kecuali informan E) telah menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan paroki, yaitu PTKAP dan PPAP (2018). Kedua pedoman tersebut menggunakan dasar PSAK 45. Pernyataan para informan ini sesuai dengan observasi peneliti terhadap buku pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis pada PSAK 45, baik untuk PTKAP dan PPAP (2018).

Para informan memberikan pendapat mengenai jenis laporan yang diserahkan kepada otoritas gereja, pengguna laporan keuangan yang disusun oleh paroki atau gereja dan periode pelaporan dalam wawancara sebagai berikut:

Dulu penyusunan laporan keuangan menggunakan excel dan mengirimkan output laporan neraca, laporan laba rugi dan arus kas. Saat ini paroki menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem pelaporan online yang telah disusun oleh otoritas gereja. Output dari sistem online berbeda dengan excel yang menyediakan laporan arus kas. Setiap saat otoritas gereja dapat melihat laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan paroki, tetapi periode yang disyaratkan oleh otoritas gereja adalah 1 bulan. Laporan keuangan ini akan digunakan oleh paroki untuk membuat keputusan yang dibuat dalam rapat dewan paroki, misal nya untuk bendahara, saya menjadi tahu utang rutin, misal jumlah DSP yang harus disetor. Kalau untuk otoritas gereja, saya tidak tahu (Informan A, Bendahara – 4.2.11)

Laporan keuangan yang dibuat adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan realisasi penerimaan dan beban, realisasi anggaran pengadaan aset tetap. Model laporan dilakukan secara online, semua data administrasi keuangan paroki dilaporkan ke otoritas gereja, sehingga mereka bisa melihat semua laporan paroki. Kalau pengguna, yang pasti adalah paroki atau dewan paroki dan otoritas gereja. Otoritas gereja biar seleksi sendiri mana yang akan dipakai, pokoknya data tersaji, pasti otoritas gereja sangat berkepentingan dengan laporan tersebut. Kalau paroki, PGPM dan pengurus harian dewan pastoral paroki akan menggunakan untuk pembuatan RAPB tahun yang akan datang. Periode pelaporannya setiap tanggal 10 dalam bulan. (Informan B, Pastor kepala – 4.2.12)

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem online adalah laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas. Meski sebenarnya di sistem online juga bisa melihat realisasi RAPB, tetapi RAPB kan bukan laporan keuangan. Laporan ini dimulai dari input data oleh staf administrasi keuangan paroki dan saya bantu sebagai bendahara. Laporan keuangan ini, meski bisa dilihat setiap saat, tetapi otoritas gereja memiliki cut off waktu pelaporan setiap tanggal 10 di tiap bulannya. Kalau pengguna, pastinya dewan paroki (dewan harian) untuk membuat keputusan tertentu dalam rapat, misalnya untuk membeli aset. Otoritas gereja mestinya juga membutuhkan, tetapi saya tidak tahu dipergunakan untuk apa, mungkin untuk data saat monitoring evaluasi yang dilakukan pada periode tertentu (4 tahun). (Informan C, Bendahara – 4.2.13)

Laporan keuangan yang disusun adalah laporan neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran penerimaan dan biaya. Laporan ini digunakan oleh dewan paroki untuk membuat keputusan, misalnya untuk menyusun RAPB yang harus memperhatikan kondisi penerimaan dan pengeluaran sehingga bisa menyusun program kerja yang tepat dan dapat didanai. Selain itu laporan keuangan juga digunakan oleh otoritas reksa pastoral, pengurus PGPM (Pengurus Gereja dana Papa Miskin). Kami melakukan pelaporan ini sejak ada buku petunjuk teknis keuangan dan akuntansi paroki, dan kami memiliki batas waktu pelaporan tiap bulan, yaitu tanggal 10. (Informan D, Pastor paroki -4.2.14)

Yang ada saat ini hanya laporan pertanggungjawaban atas pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan gereja. Jadi hanya bersifat laporan pendapatan dan pengeluaran kas. Belum ada laporan keuangan yang terstruktur seperti yang disyaratkan dalam PSAK 45. (Informan E, Bendahara GKJ)

Dari pernyataan para informan, kecuali informan E, dapat diketahui bahwa laporan yang disusun oleh paroki adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas (informan A menyebut sebagai laporan laba rugi) dan laporan arus kas. Jenis laporan yang dibuat oleh paroki sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan bagi entitas non laba yang disyaratkan PSAK 45. Sedangkan catatan atas laporan keuangan sama sekali tidak disebutkan, meskipun PPAP (2018) disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan menjadi salah satu komponen laporan keuangan paroki (PPAP, 2018, hal.11). Beberapa laporan yang disebutkan informan, seperti laporan realisasi anggaran penerimaan dan beban (RAPB) serta realisasi pengadaan aset merupakan laporan tambahan yang disyaratkan otoritas gereja untuk melakukan pengendalian terhadap pencapaian program kerja paroki dan pengadaan aset tetap. Informan C adalah satu-satunya informan yang tidak menyebutkan laporan arus kas sebagai laporan yang disusun oleh paroki. Perbedaan ini disebabkan oleh belum tersedianya laporan arus kas dalam sistem online yang disusun oleh otoritas gereja dan mulai disosialisasikan di tahun 2020. Berbeda

dengan sistem penyusunan laporan keuangan sebelumnya, yang menggunakan excel. Dalam excel tersebut tersedia laporan arus kas. Informan C adalah bendahara paroki yang mulai aktif di tahun 2020, sehingga logis jika tidak menyebutkan laporan arus kas, karena memang tidak tersedia dalam sistem online.

Dari sisi pengguna, semua informan memiliki penjelasan yang sama mengenai pengguna laporan keuangan, yaitu dewan harian, termasuk di dalamnya pastor kepala dan vikaris. Jenis-jenis pembuatan keputusan yang dijelaskan oleh informan mendeskripsikan bahwa para informan mampu menggunakan laporan keuangan untuk pembuatan keputusan, baik yang berkaitan dengan perencanaan program kerja, pengendalian dan evaluasi bagi perencanaan yang akan datang.

4.2.1. Persepsi informan terhadap komponen dan kebermanfaatan laporan posisi keuangan

Bagian ini akan menyajikan deskripsi mengenai persepsi masing-masing informan terhadap empat komponen laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam ISAK 35. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan meliputi: 1) Manfaat laporan posisi keuangan (neraca). 2) Pemahaman tentang elemen laporan posisi keuangan (neraca).

Informan A sebagai bendahara paroki memberikan pendapat mengenai pertanyaan tentang persepsi terhadap elemen laporan posisi keuangan yang disyaratkan dalam ISAK 35 sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan keuangan yang memuat kas dan aset lain seperti tanah, bangunan, peralatan dan lainnya serta kewajiban. Dari neraca, kita bisa melihat kekayaan atau aset gereja. Selama ini fokus terhadap neraca terdapat pada akun kas dan bank. Kewajiban tidak menjadi fokus bagi bendahara dan dewan paroki. (4.3.1-1)

Informan B, sebagai pastor kepala memberikan pendapat mengenai laporan posisi keuangan menurut ISAK 35 sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan merupakan salah satu output dari laporan keuangan sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditetapkan oleh otoritas gereja. Dalam laporan posisi keuangan ini, aset disusun berdasarkan likuiditasnya dan kewajiban disajikan menurut jatuh temponya. (4.3.1-2)

Informan C adalah bendahara aktif paroki yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan rutin gereja. Persepsi mengenai laporan posisi keuangan sesuai ISAK 35 dijelaskan sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca menyajikan semua aset, kewajiban dan aset bersih yang dimiliki oleh paroki pada periode tertentu. Aset mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh paroki, sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi oleh paroki. Aset bersih merupakan kekayaan bersih paroki. (4.3.1-3)

Informan D, seorang pastor kepala paroki yang secara struktur memiliki tanggung jawab terhadap pelaporan keuangan sekaligus pengguna bagi pembuat keputusan.

Persepsi informan D terhadap laporan posisi keuangan menurut ISAK 35 adalah:

Laporan posisi keuangan atau neraca mengandung unsur aset dan kewajiban. Aset menggambarkan harta yang dimiliki paroki, misalnya paroki memiliki kas, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Kewajiban menggambarkan kewajiban yang harus dipenuhi paroki, misalnya adanya pinjaman untuk membeli aset sehingga paroki harus mengembalikan. (4.3.1-4)

Informan E sebagai bendahara GKJ yang pernah mendapat pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan memahami tentang komponen-komponen laporan keuangan namun mengakui bahwa selama ini kesulitan dalam membuat laporan keuangan sesuai PSAK 45. Berikut pernyataan dari informan E.

Saya mengerti komponen-komponen laporan keuangan. Ada neraca, arus kas...kalau nirlaba kan tidak ada laporan laba-rugi.... Saya tahu menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 karena pernah mengikuti pelatihan PSAK 45

tetapi masalahnya aset gereja ini hampir semua berasal dari donasi sehingga belum tertata dengan baik.

Tabel 4.1 berikut menyajikan proses pengkodean atas jawaban informan mengenai komponen laporan posisi keuangan:

Tabel 4.1
Pengkodean Komponen Laporan Posisi Keuangan

Informan	Komponen laporan keuangan
A	Kas, bank, aset, kewajiban
B	Aset
C	Aset, kewajiban, aset bersih
D	Aset, kewajiban
E	Aset

Sumber: data primer diolah, 2021

Hasil wawancara mengenai persepsi lima informan terhadap laporan posisi keuangan memberikan penjelasan, bahwa kelima informan memiliki persepsi yang sama mengenai laporan posisi keuangan, meski dengan kualitas penjelasan yang berbeda-beda. Informasi mengenai elemen dari laporan posisi keuangan dari tiga informan hanya menyebutkan dua elemen laporan posisi keuangan, yaitu aset dan kewajiban. Sedangkan aset bersih, sebagai bagian dari laporan posisi keuangan tidak disebutkan, kecuali oleh informan C.

Hal menarik lain dari wawancara ini adalah, penyebutan akun utama yang ada dalam laporan posisi keuangan, mengindikasikan bahwa pedoman penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh para informan, masih mengacu pada PSAK 45. PSAK 45 mengklasifikasi aset bersih dalam laporan posisi keuangan, hal ini sesuai dengan jawaban dari informan C. Sedangkan, aset bersih dalam ISAK 35 merupakan laporan yang berdiri sendiri yang menjadi bagian dari seluruh laporan keuangan menurut ISAK 35. Analisis ini didukung oleh pernyataan para informan

di kode 4.2-1 sampai dengan 4.2 -5 yang menyatakan belum mengetahui secara detail ISAK 35 atau hanya sekedar pernah mendengar mengenai ISAK 35.

Pernyataan informan dengan kode 4.2-6 sampai 4.2-10 mengenai pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan menyatakan bahwa otoritas gereja telah menyusun pedoman penyusunan laporan keuangan, yaitu PTKAP dan PPAP (2018). Pedoman penyusunan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan PSAK 45. Pendapat ini, menjadi argumentasi mengapa para informan menyebutkan akun utama dalam laporan posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban dan aset bersih.

Informan A memberikan penjelasan mengenai manfaat elemen-elemen dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Fokus bendahara maupun dewan paroki dari laporan keuangan adalah kas (terletak di laporan posisi keuangan). Kas merupakan elemen laporan posisi keuangan yang sering menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan merupakan akun yang selalu dipresentasikan dalam pertemuan dewan paroki. Sebagai contoh, pada masa pandemi, penerimaan kolekte dari umat menurun, kas menjadi akun penting untuk melakukan pengecekan, apakah paroki masih mampu untuk membiayai pengeluaran operasional, misalnya gaji karyawan. (4.3.1-6)

Pada posisi yang sama sebagai bendahara paroki, informan C memberikan pendapat mengenai kegunaan dari laporan posisi keuangan, sebagai berikut:

Dari laporan posisi keuangan kita bisa mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh paroki. Contohnya, dengan melihat kas, paroki bisa membuat keputusan untuk membuat kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini dengan memberikan bantuan pangan dan pengobatan yang diperlukan. (4.3.1-7)

Sebagai pastor kepala dan bendahara GKJ, informan B, D dan E memberikan pendapat mengenai manfaat laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Sebagai kepala paroki, saya menggunakan informasi di neraca, misalnya kas. Besarnya kas, menjadi pertimbangan bagi dewan paroki untuk membuat keputusan, misalnya di masa pandemi ini, apakah gereja akan menyumbang obat-obatan, pangan dan apa saja yang dibutuhkan umat yang terdampak wabah covid ini. Saya melihat dari kas. Kalau contoh lain, kewajiban atau utang, saya harus berfikir dengan besaran utang itu, bagaimana harus terselesaikan dan disetor secara rutin (ini misalnya seperti DSP). (Informan B - 4.3.1-8)

Laporan neraca saya gunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana program paroki, misal saja dengan kas sekian, maka program kerja apa saja yang akan bisa dilakukan di tahun depan. Tentu saja lalu dari penerimaan kas selama 1 tahun, kita bisa mengira-ira (memprediksi) kas yang akan diterima 1 tahun yang akan datang. Apalagi saat pandemi seperti ini, program kerja harus dipilih yang menjadi prioritas. (Informan D, – 4.3.1-9)

Laporan posisi keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 45 bermanfaat untuk menganalisis kebijakan gereja. Jadi setiap tahunnya nanti bisa dilihat dari laporan posisi keuangan itu untuk mengevaluasi dan menetapkan program-program gereja ke depan (Informan E, Bendahara GJK)

Secara ringkas jawaban informan terhadap kebermanfaatan laporan posisi keuangan tersaji pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Pengkodean Kebermanfaatan Laporan Posisi Keuangan

Informan	Kebermanfaatan laporan keuangan
A	Kas merupakan komponen sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan
B	Kas menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, kewajiban berfikir tentang bagaimana harus diselesaikan/disetor
C	Mengetahui jumlah aset paroki
D	Laporan neraca untuk dasar pertimbangan menyusun rencana program paroki
E	Laporan posisi keuangan untuk mengevaluasi dan menetapkan program ke depan

Sumber: data primer diolah, 2021

Penjelasan para informan mengindikasikan bahwa mereka memahami manfaat dari laporan posisi keuangan, meskipun sebagian besar menggunakan akun kas sebagai contoh untuk mendeskripsikan bagaimana mereka menggunakan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana program kerja paroki, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena wabah di masa pandemi, melakukan kontrol atas kewajiban dan menilai kemampuan paroki untuk membiayai pengeluaran rutin. Pernyataan para informan ketika menjelaskan bagaimana mereka memilih akun kas, salah satunya, sebagai contoh penggunaan informasi dalam laporan posisi keuangan, dapat menjelaskan bahwa para informan mampu melihat dan memilih akun dengan tepat dan logis untuk sebuah keputusan tertentu.

4.2.2. Persepsi informan terhadap komponen dan kebermanfaatan laporan pendapatan komprehensif

Bagian ini akan menjelaskan persepsi informan terhadap laporan pendapatan komprehensif yang disyaratkan ISAK 35, meliputi elemen dan kegunaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan meliputi: 1) Pemahaman informan tentang elemen-elemen pendapatan komprehensif. 2) Pemahaman informan tentang manfaat laporan pendapatan komprehensif. Pertanyaan ini tidak diajukan kepada informan E karena belum mengetahui tentang istilah pendapatan komprehensif yang ada dalam ISAK 35. Persepsi informan mengenai elemen laporan pendapatan komprehensif sebagai berikut:

Elemen dari laporan laba rugi, saya menyebutnya laba rugi, adalah penerimaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Penerimaan utama paroki berasal dari kolekte umat, yang kemudian dikelola oleh bendahara untuk diklasifikasikan menurut peruntukannya yang telah

diatur oleh otoritas gereja, misalnya dana solidaritas paroki (Informan A, Bendahara – 4.3.2.1)

Unsur dari laporan aktivitas adalah penerimaan dan biaya-biaya operasional kegiatan paroki. Penerimaan dari kolekte menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan paroki, meskipun paroki bisa meminta bantuan otoritas gereja untuk kegiatan yang pendanaannya besar dan paroki tidak mampu mendanai. (Informan B, Pastor kepala – 4.3.2-2)

Laporan aktivitas, kita bisa melihat penerimaan dan beban. Pada dasarnya sama dengan laporan laba rugi di perusahaan profit, hanya saja di sistem ini dikelompokkan lebih detail, penerimaan menurut sumber, misal penerimaan dari kolekte, ini bisa diklasifikasikan menjadi penerimaan kolekte umum untuk dana papa miskin, pendidikan atau peruntukan lain. Klasifikasi sudah disediakan oleh sistem. (Informan C, Bendahara- 4.3.2 -3)

Laporan aktivitas itu memuat penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan operasional paroki, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan atau program visioner. (Informan D, Pastor kepala – 4.3.2-4)

Tabel 4.3. berikut merupakan ringkasan atau proses pengkodean jawaban informan mengenai komponen laporan pendapatan komprehensif:

Tabel 4.3
Pengkodean Komponen Laporan Pendapatan Komprehensif

Informan	Komponen laporan keuangan
A	Penerimaan dan biaya dalam satu periode tertentu
B	Penerimaan dan biaya-biaya operasional paroki
C	Penerimaan dan beban
D	Penerimaan dan pengeluaran
E	-

Sumber: data primer diolah, 2021

Penjelasan para informan di atas, kecuali informan E, mengindikasikan bahwa mereka mengetahui elemen yang ada di laporan pendapatan komprehensif, yaitu penerimaan dan beban. Prinsip dari konsep pendapatan dan beban telah sesuai dengan pernyataan dalam ISAK 35. Penjelasan informan A dan C dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa informan memahami elemen penerimaan yang dipisahkan ada pembatasan dan tidak ada pembatasan. Dalam PPAP (2018) disebut

dengan istilah penerimaan umum dan penerimaan terikat sementara. Penjelasan informan yang memiliki peran bendahara, lebih detail daripada penjelasan yang diberikan oleh informan yang memiliki peran pastor kepala yang cenderung memberikan penjelasan praktis. Hal ini terjadi karena bendahara melakukan praktik langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga memahami dengan detail. Sedangkan pastor kepala, meskipun menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, tetapi mereka lebih berperan sebagai pengguna yang mengambil informasi tertentu yang mereka butuhkan. Informan A dalam pernyataan 4.3.1-6 menjelaskan bahwa kas merupakan akun/elemen yang sering digunakan dalam pembuatan keputusan dalam rapat dewan paroki.

Penjelasan di bawah ini, akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat informan A di pernyataan 4.3.1-6. Apakah pastor kepala memiliki kecenderungan untuk memperhatikan informasi kas saja, atau sebenarnya memiliki pemahaman untuk menggunakan informasi dalam laporan pendapatan komprehensif? Berikut ini adalah pernyataan para informan mengenai kegunaan laporan pendapatan komprehensif:

Dalam rapat dewan harian, kami menggunakan penerimaan sebagai cara untuk melakukan evaluasi kolekte di masa pandemi yang tentu saja menurun. Oleh karena itu, kami memikirkan cara untuk meningkatkan kolekte dengan memfasilitasi umat yang ingin kolekte tetapi terkendala. Dalam rapat dewan tersebut kemudian muncul cara-cara pengumpulan kolekte dengan e-money dan amplop yang diedarkan di tiap lingkungan. (Informan A, Bendahara – 4.3.2 -6).

Laporan aktivitas bisa digunakan sebagai dasar menyusun rencana penerimaan dan biaya program kerja untuk satu tahun yang akan datang. Perkiraan jumlah penerimaan ini akan menjadi pedoman penyusunan program kerja bagi paroki dan bisa saja untuk menentukan program-program yang membutuhkan bantuan dari otoritas gereja. Selain itu, kita juga bisa melihat

perubahan ABTS (Aset Bersih Terikat Sementara) dan ABTT (Aset Bersih Tidak Terikat). (Informan B, Pastor Kepala – 4.3.2-7)

Di laporan aktivitas, kita bisa melihat penerimaan dan beban yang terjadi di paroki selama satu periode. Penerimaan dan beban, informasi ini bisa kita gunakan untuk perencanaan, terutama saat membuat RAPB. Kita bisa membuat estimasi yang lebih baik untuk merencanakan program kerja paroki. Selain itu, kalau kita melihat juga realisasinya, kita bisa melihat program kerja yang mana, yang berhasil dilakukan dengan baik begitu juga penyerapan dananya, apakah surplus atau defisit. Nah, dua jenis laporan yang bisa ditemukan di sistem online ini akan membantu melakukan perencanaan yang baik, karena memungkinkan kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan beban yang sudah dikeluarkan. (Informan C, Bendahara -4.3.2-8)

Penerimaan yang menurun saat pandemic covid-19 ini bisa saya lihat kan dari laporan aktivitas. Sebagai contoh, dengan menurunnya penerimaan dari kolekte, maka harus ada penyesuaian terhadap rencana-rencana yang telah dibuat. Paroki dalam rapat dewan harian, memutuskan untuk menunda pelaksanaan rencana pengadaan aset yang telah dibuat di awal tahun. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dibutuhkan di masa pandemi. (Informan D, Pastor kepala – 4.3.2-9)

Berikut proses pengkodean kebermanfaatan laporan pendapatan komprehensif dari para informan:

Tabel 4.4
Pengkodean Kebermanfaatan Laporan Pendapatan Komprehensif

Informan	Kebermanfaatan laporan keuangan
A	Informasi mengenai penerimaan untuk melakukan evaluasi dan menentukan cara-cara untuk mengatasi masalah
B	Dapat digunakan untuk dasar menyusun rencana program kerja
C	Dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi
D	Dapat digunakan membuat keputusan-keputusan jangka pendek maupun jangka panjang
E	-

Sumber: data primer diolah, 2021

Penjelasan para informan mengenai kegunaan laporan pendapatan komprehensif dapat mendeskripsikan bahwa informan memahami kegunaan dari elemen-elemen laporan pendapatan komprehensif. Para informan mampu

menggunakan elemen penerimaan untuk mengevaluasi cara-cara kolekte sebagai sumber penerimaan utama yang menurun saat pandemi, penundaan pengadaan aset dan dialihkan ke kegiatan kemanusiaan sampai dengan penggunaan penerimaan untuk melakukan prediksi penerimaan dalam penyusunan rencana program kerja paroki.

Dari sisi beban, penjelasan informan B (pastor kepala) dan C (bendahara) memberikan deskripsi kegunaan dari beban. Elemen beban dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan reksa pastoral/gereja. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan informasi yang dapat diperoleh dari realisasi biaya dan output pelaksanaan untuk setiap program kerja yang tersedia dalam sistem online. Efisiensi atau kondisi surplus dan defisit dari pelaksanaan program kerja dapat dievaluasi sebagai dasar penyusunan rencana program kerja.

Hal menarik, tampak pada elemen beban yang menjadi istilah umum dalam laporan keuangan. Informan C (bendahara) adalah satu-satunya informan yang menyebut beban sebagai elemen laporan pendapatan komprehensif, sedangkan informan B dan D (pastor kepala) menyebut sebagai biaya. Informan A (bendahara) tidak menyebutkan beban atau biaya karena menjelaskan kegunaan laporan penghasilan komprehensif dari sisi penerimaan. Latar belakang pendidikan yang terdiskripsi dalam informasi para informan yang terlibat dalam penelitian ini, kemungkinan besar mempengaruhi cara penyebutan elemen.

4.2.3. Persepsi informan terhadap komponen dan kebermanfaatan laporan arus kas

Fokus ketiga dalam penelitian ini adalah laporan arus kas berdasarkan ISAK

35. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan laporan arus meliputi: 1) Pemahaman informan tentang elemen-elemen laporan arus kas. 2) Pemahaman informan tentang manfaat elemen-elemen laporan arus kas. Berikut jawaban yang diberikan para informan laporan arus kas:

Sistem tidak memiliki output laporan arus kas, dan selama ini memang tidak pernah digunakan dalam pembuatan keputusan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Secara umum laporan arus kas memberikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tetapi bentuknya seperti apa untuk paroki, saya belum tahu. (Informan A, Bendahara – 4.3.3-1)

Saya hanya pernah mendengar tentang laporan arus kas, tetapi tidak pernah tahu detailnya. Pokoknya prinsip pembuatan laporan keuangan, benar, ada bukti, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. (Informan B, Pastor kepala – 4.3.3-2)

Laporan arus kas tidak tersedia di sistem, jadi kami juga tidak pernah melihat bentuk seperti apa yang disyaratkan oleh gereja. Apakah bentuknya sama dengan laporan arus kas profit atau berbeda. (Informan C, Bendahara – 4.3.3-3)

Laporan arus kas, saya belum pernah tahu dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Saya tahunya hanya kas masuk dan keluar, penggunaannya yang saya bisa lihat di realisasi penerimaan dan pengeluaran (Informan D, Pastor kepala – 4.3.3-4)

Saya tahu tentang laporan arus kas tetapi belum pernah membuat laporan arus kas. Selama ini gereja memiliki laporan yang dinamakan laporan arus kas tetapi hanya berisi ringkasan penerimaan kas selama satu bulan dan satu tahun (Informan E, Bendahara GKJ)

Dari jawaban-jawaban yang diberikan para informan dapat dimengerti bahwa pemahaman tentang laporan arus menurut ISAK 35 yang bervariasi. Hal ini seperti yang tersaji dari tabel pengkodean berikut ini:

Tabel 4.5
Pengkodean Komponen Laporan Arus Kas

Informan	Komponen laporan keuangan
A	Sistem tidak ada output laporan ini, komponen ada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan tetapi praktek di paroki tidak tahu
B	Tidak tahu
C	Tidak tersedia di sistem
D	Hanya tahu arus kas masuk dan keluar
E	Tahu tetapi belum pernah membuat

Sumber: data primer diolah, 2021

Penjelasan para informan dalam pernyataan 4.2.11 sampai dengan 4.2.15 menyatakan bahwa salah satu laporan keuangan yang diserahkan ke otoritas gereja adalah laporan arus kas oleh informan B dan D yang adalah pastor kepala. Sedangkan informan A, C, dan E yang berperan sebagai bendahara tidak menyebutkan laporan arus kas sebagai laporan yang harus dibuat untuk diserahkan kepada otoritas gereja karena ketidaktersediaannya dalam sistem (keuangan) online. Namun khusus untuk informan E, bendahara gereja menyetarakan laporan arus kas dengan laporan pemasukan dan pengeluaran kas yang selama ini telah dibuat gereja.

Informan A menjelaskan lebih lanjut, bahwa pada sistem keuangan berbasis excel, laporan arus kas tersedia tetapi tidak untuk sistem keuangan online saat ini, meski dalam menu tersedia tetapi belum dapat berfungsi. Observasi terhadap dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, yaitu PPAP (2018) menemukan bahwa laporan arus kas memang tercatat sebagai salah

satu laporan yang harus dibuat oleh paroki/gereja. Lebih lanjut bisa jika dilihat bahwa dalam pedoman penyusunan laporan keuangan tersebut, tidak terdapat penjelasan akun atau elemen dari laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, seperti penjelasan untuk laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas (PSAK 45).

Kebermanfaatan dari laporan arus kas juga tidak bisa dianalisis karena memang laporan ini tidak disajikan karena secara sistem memang tidak tersedia sehingga untuk proses pengambilan keputusan dengan melihat pada posisi buku besar kas dan bank. Kebermanfaatan laporan keuangan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan disajikan pada sub bab berikut ini.

4.2.4. Kebermanfaatan laporan keuangan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan

Analisis terhadap kebermanfaatan sebagian telah dapat diperoleh dari pernyataan-pernyataan informan-informan dalam bagian sebelumnya. Dalam bagian ini, fokus kebermanfaatan laporan keuangan menekankan aspek perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para informan meliputi: 1) Manfaat pelaporan keuangan organisasi non laba untuk tujuan perencanaan. 2) Manfaat pelaporan keuangan organisasi non laba untuk tujuan pengendalian. 3) Manfaat pelaporan keuangan organisasi non laba untuk pengambilan keputusan. Berikut hasil wawancara dari para informan berkaitan dengan kebermanfaatan laporan keuangan dalam mendukung misi pelayanan gereja:

Sebagai bendahara, pelaporan keuangan tentu saja bermanfaat bagi pembuatan keputusan, seperti yang telah dijelaskan tadi tentang keputusan

cara untuk memfasilitasi kolekte umat untuk meningkatkan penerimaan sehingga paroki/gereja dapat mendanai kebutuhan operasional (lih. 4.3.2-6). Sedangkan dalam perencanaan, jumlah penerimaan ini bisa menjadi dasar untuk memprediksi penerimaan yang akan ditetapkan untuk penyusunan program kerja paroki. Dari sisi pengendalian, paroki bisa membuat prioritas pendanaan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. (Informan A, bendahara -4.3.4-1)

Pelaporan keuangan bagi saya, pastor kepala memiliki manfaat dalam hal perencanaan, misalnya, pada masa pandemi ini, paroki bisa menaikkan anggaran untuk bantuan pangan dan pengobatan juga pendidikan bagi umat yang menjadi korban akibat covid 19. Dari sisi pengendalian, saya bisa menggunakan perbandingan realisasi dan RAPB sekaligus membuat keputusan, misal yang pas dengan masa sekarang adalah menurunkan kuota beban perjalanan. Tentu saja laporan keuangan ini mendukung karya pastoral (Informan B, Pastor kepala – 4.3.3-2)

Yang selama ini saya alami sebagai bendahara baru di paroki, pelaporan keuangan dapat digunakan untuk dasar membuat RAPB dengan capaian tahun lalu kita bisa mengestimasi, penerimaan misalnya. Untuk pembuatan keputusan sekaligus menyusun prosedur pengendalian, misalnya berkaitan dengan pengadaan aset yang nilainya lebih dari 5 juta, maka butuh data vendor pembanding. (Informan C, Bendahara – 4.3.3-3)

Menurut saya, pelaporan keuangan dapat bermanfaat bagi paroki maupun otoritas gereja. Paroki menjadi memiliki data keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat RAPB terutama, karena kita harus merencanakan penerimaan dan biaya untuk semua program kerja. Kemampuan paroki dari penerimaan itu bisa digunakan sebagai dasar. Saya juga bisa melihat, apakah berjalannya program kerja itu surplus atau defisit dan apa penyebabnya, dan itu dievaluasi (Informan D, Pastor kepala -4.3.3 -4)

Untuk saat ini aktivitas gereja belum terlalu kompleks sehingga laporan keuangan nirlaba belum terlalu mendesak tetapi tetap penting karena Sinode gereja ada beberapa jemaat yang ingin mengetahui penggunaan kas untuk apa saja. Selama ini dilihat dari warta gereja. Tetapi laporan keuangan tetap penting karena Sinode akan melakukan visitasi secara rutin untuk melihat kondisi keuangan gereja dan juga ada rapat tahunan yang melibatkan seluruh jemaat sehingga pihak gereja harus transparan (Informan E, Bendahara GKJ)

Penjelasan-penjelasan di atas mengindikasikan bahwa informan dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa pelaporan keuangan memiliki nilai relevan bagi karya pastoral/gereja dalam proses perencanaan, pengendalian dan

pengambilan keputusan. Informan juga mampu menjelaskan peran laporan keuangan dalam proses perencanaan, yaitu laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan prediksi terhadap penerimaan dan beban pelaksanaan program kerja tertentu. Tidak hanya sebagai dasar prediksi, tetapi laporan keuangan dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Pernyataan informan D menjelaskan bagaimana kondisi surplus atau defisit dapat menjadi cara evaluasi penggunaan dana yang telah dialokasikan pada program kerja tertentu.

Dari sisi pengendalian, laporan keuangan dapat digunakan Bersama informasi RAPB yang terdapat dalam sistem keuangan online, dalam hal melihat progres penerimaan dan beban pada satu periode tertentu. Posisi penerimaan dan beban akan menjadi dasar untuk pembuatan keputusan, misalnya seperti yang dijelaskan oleh informan A, informasi penerimaan dapat digunakan untuk membuat keputusan mengenai cara memfasilitasi pengumpulan kolekte dari umat. Informan B juga menjelaskan bagaimana laporan keuangan bisa digunakan untuk membuat keputusan dalam menurunkan kuota (beban) perjalanan yang tidak banyak diperlukan di masa pandemi. Alih program pun dimungkinkan seperti memprioritaskan pendanaan bagi umat yang menjadi korban pandemic dengan memberikan bantuan pengobatan, pangan dan pendidikan.

Informan C justru menjelaskan bagaimana kondisi yang terdeskripsi dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun prosedur pengendalian untuk pengadaan aset. Pengalaman-pengalaman pelaksanaan aktivitas dalam paroki/gereja yang tercermin dalam laporan keuangan, dapat

menjadi motivasi tumbuhnya *governance* dalam pengelolaan paroki, salah satunya tersedianya prosedur yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembuatan keputusan.

4.3. Pembahasan

Gereja sebagai entitas non laba mengandalkan sumber pendanaan dari umat/jemaat untuk mendukung seluruh aktivitas/program kerja pastoral/gereja. Teori legitimasi menjelaskan pentingnya posisi gereja sebagai suatu entitas yang memiliki kontrak sosial dengan umat, melalui dana yang diberikan kepada umat dan keseluruhan pengelolaan gereja serta program kerja rutin dan visioner. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan gereja, baik dewan paroki atau majelis, berkewajiban untuk memberikan pelayanan gerejawi dalam rangka memelihara dan meningkatkan iman jemaat/umat melalui seluruh yang dilakukan. Teori legitimasi mengisyaratkan bahwa suatu organisasi harus menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan batasan dan norma (Deegan *et al.*, 2002).

Gereja sebagai subyek penggerak umat berkewajiban melaksanakan program-program kerja sehingga umat mengalami keselamatan dan transformasi hidup ke arah yang lebih baik (PDPP, 2020). Agar tujuan ini dapat tercapai, pihak gereja harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan produktif sehingga misi pelayanan gereja dapat diwujudkan. Pengelolaan dana yang efektif dan produktif hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi yang andal dan relevan dalam mengalokasikan dana jemaat/umat. Sumber informasi penting yang dapat memenuhi kebutuhan para pengelola gereja adalah laporan keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan dapat bermanfaat untuk membantu pengelola gereja menetapkan program-program yang sesuai misi gereja sehingga umat merasakan bahwa gereja hadir untuk melayani mereka.

Tidak hanya perencanaan, laporan keuangan juga bermanfaat untuk tujuan pengendalian. Pengelola gereja perlu mengetahui apakah program-program yang telah ditetapkan berjalan sesuai harapan dan tidak terjadi penyimpangan. Ketersediaan informasi yang andal dan relevan mengharuskan pihak pengelola gereja memahami prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini, standar pelaporan keuangan untuk organisasi non laba yang wajib digunakan adalah ISAK 35 (PSAK 45).

Perlu dicatat bahwa ISAK 35 sebagai standar penyusunan pelaporan keuangan terbaru yang menggantikan PSAK 45 secara esensial sama dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karena itu, pembahasan persepsi para informan tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba mengacu pada ISAK 35 atau PSAK 45. Selain itu, perlu juga dicatat bahwa informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari gereja katolik dan protestan. Lebih spesifik, ada empat informan yang berasal dari gereja katolik dan satu berasal dari gereja protestan.

Pembahasan persepsi informan tentang pelaporan keuangan non laba yang akan dipaparkan dalam bagian berikutnya. Pernyataan penelitian akan dibahas secara berurutan dan akan dikaitkan dengan masalah penelitian. Perlu disampaikan ulang bahwa masalah penelitian yang menjadi fokus pembahasan adalah rendahnya keterterapan standar pelaporan keuangan organisasi non laba di kalangan gereja.

Dari wawancara yang dilakukan mungkin dapat diketahui alasan mendasar yang menyebabkan pihak penyelenggara gereja kurang responsif dalam menyikapi ISAK 35.

4.3.1. Keberadaan ISAK 35

Dari analisis yang telah dilakukan di bagian sebelumnya dapat dipahami bahwa secara umum para informan mengetahui keberadaan standar pelaporan keuangan yang telah ditetapkan badan otoritas akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu ISAK 35 atau sebelumnya PSAK 45. Disamping itu, observasi terhadap dokumen PPAP (2018) mengindikasikan bahwa dasar yang digunakan dalam pedoman penyusunan laporan keuangan adalah PSAK 45.

Walaupun secara umum informan mengetahui keberadaan ISAK 35, tampaknya informan satu dengan yang lain memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Dari wawancara yang dilakukan dapat dipahami bahwa bendahara paroki lebih memahami keberadaan ISAK 35 daripada para pastor kepala. Hal ini logis karena bendahara paroki berpendidikan sarjana akuntansi yang saat ini bekerja pada bidang akuntansi dan kantor akuntan publik. Perbedaan diantara keduanya terlihat dalam hal memahami konsep dan praktik pelaporan keuangan. Perbedaan ini bukan sesuatu yang luar biasa mengingat peran mereka berbeda dalam hal penyediaan, pemrosesan dan pemanfaatan informasi keuangan. Respon para informan terkait dengan keberadaan ISAK 35 mengindikasikan bahwa lambatnya penerapan ISAK 35 dikalangan gereja bukan akibat dari ketidaktahuan tentang keberadaan ISAK 35.

4.3.2. Laporan Posisi Keuangan

Pertanyaan tentang laporan posisi keuangan dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman informan tentang laporan posisi keuangan dan manfaatnya. Respon yang diberikan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa hampir semua informan memahami laporan posisi keuangan dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Bahkan beberapa informan yang berasal dari gereja katolik sudah cukup terbiasa dengan laporan posisi keuangan berbasis PSAK 45 yang bisa diketahui dari *output* laporan keuangan *online* paroki yang memiliki kesesuaian dengan yang dinyatakan dalam PSAK 45. Walaupun secara umum sudah mengenal laporan posisi keuangan dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, pemahaman tentang arti penting elemen-elemen laporan posisi keuangan tampaknya masih belum sama diantara para informan. Ada kecenderungan bahwa mereka lebih mementingkan kas daripada elemen yang lain sehingga cenderung mengabaikan yang lain.

Respon yang diberikan informan tentang manfaat laporan posisi keuangan cukup beragam. Beberapa informan memberi jawaban yang sangat sederhana dalam menjawab pertanyaan tentang manfaat laporan posisi keuangan. Mereka tampaknya menyelaraskan manfaat laporan posisi keuangan secara keseluruhan dengan kas yang merupakan salah satu elemen di dalamnya. Mereka menganggap kas merupakan elemen yang paling penting dari yang lain dan bahkan lebih penting dari laporan posisi keuangan secara keseluruhan. Sebagian besar informan yang berasal dari gereja katolik mengatakan bahwa laporan posisi keuangan memungkinkan

mereka mengetahui posisi kas perusahaan sehingga bisa membuat keputusan penting tentang jumlah kas yang bisa dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sementara informan yang berasal dari gereja protestan memberi jawaban yang cukup relevan dengan mengatakan bahwa laporan posisi keuangan bermanfaat untuk mengevaluasi program-program yang telah dijalankan sebagai dasar dalam menentukan program-program gereja di masa mendatang. Namun ketika pertanyaan lanjutan diberikan tentang alasan gereja belum menerapkan ISAK 35 (PSAK 45), informan tersebut mengatakan gereja belum memiliki daftar inventaris aset gereja. Ini menghalangi mereka untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Jawaban-jawaban yang diberikan informan mengindikasikan bahwa sesungguhnya mereka paham arti penting laporan posisi keuangan dalam menunjang kegiatan gereja. Untuk gereja katolik, sistem keuangan online yang mereka miliki menunjukkan bahwa PSAK 45 telah digunakan secara terbatas. Tidak demikian dengan gereja protestan. Mereka belum menerapkan PSAK 45 karena terhalang nilai aset yang belum tercatat secara lengkap dan sesuai dengan nilai pasar.

4.3.3. Laporan Penghasilan Komprehensif

Pertanyaan tentang laporan penghasilan komprehensif dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman tentang elemen-elemen pendapatan komprehensif dan manfaatnya. Respon yang diberikan para informan menunjukkan bahwa secara umum mereka mengenal laporan penghasilan komprehensif menurut ISAK 35 tetapi menyamakannya dengan laporan aktivitas dalam PSAK 45. Walaupun istilah

laporan penghasilan komprehensif dan laporan aktivitas penyebutannya berbeda, secara esensi keduanya hampir sama. Berkaitan dengan manfaatnya, respon informan mengindikasikan bahwa mereka memahami manfaat elemen-elemen laporan penghasilan komprehensif. Namun tampak dengan jelas bahwa informan lebih mementingkan ketersediaan kas yang diperoleh dari donatur/jemaat untuk mendanai program-program gereja.

Para informan mampu menggunakan elemen penerimaan untuk mengevaluasi cara-cara kolekte sebagai sumber penerimaan utama yang menurun saat pandemi, penundaan pengadaan aset dan dialihkan ke kegiatan kemanusiaan sampai dengan penggunaan penerimaan untuk melakukan prediksi penerimaan dalam penyusunan rencana program kerja ke depan.

Pemahaman para informan tentang elemen-elemen laporan penghasilan komprehensif serta manfaatnya untuk menyusun rencana-rencana ke depan tampaknya bukan halangan bagi gereja untuk mengadopsi ISAK 35 secara penuh. Tampaknya kendala utama terletak pada persepsi bahwa gereja hanya perlu informasi tentang kas untuk memastikan bahwa seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mendukung program gereja masih tersedia atau sudah menipis.

4.3.4. Laporan Arus Kas

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan laporan arus dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman informan tentang elemen-elemen laporan arus kas dan manfaatnya. Respon yang diberikan para informan menunjukkan bahwa sebagian besar mengerti tentang laporan arus walaupun belum pernah membuat atau melihat secara langsung bentuk dari laporan arus kas gereja yang ada di sistem keuangan

online. Dari dokumen yang digunakan gereja katolik dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan arus kas sebagai salah satu laporan wajib yang harus dibuat oleh paroki. Namun dari respon informan dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka belum pernah melihat laporan arus kas resmi dari gereja. Sementara respon dari informan yang berasal dari gereja protestan menunjukkan informan paham tentang laporan arus kas walaupun laporan arus kas yang ada di gereja saat ini hanya sekedar laporan pendapatan dan pengeluaran kas.

Pemahaman para informan tentang laporan arus kas secara relatif baik. Kondisi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi gereja dalam menerapkan secara penuh ISAK 35. Mungkin yang menjadi penghalang adalah persepsi manfaat laporan arus kas yang belum dipahami secara lengkap dan cenderung direduksi hanya sebagai laporan kas keluar dan kas masuk semata.

4.3.5. Kebermanfaatan Laporan Keuangan

Berdasarkan pada analisis mengenai kebermanfaatan laporan keuangan terhadap pada informan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang ada bermanfaat dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang ada memiliki nilai relevan. Informasi relevan karena memiliki kemampuan prediktif dan juga umpan balik. Kemampuan prediktif dapat ditunjukkan bahwa informasi yang tersaji dapat digunakan untuk melakukan perencanaan mengenai kemungkinan sumber dan pemanfaatan dana untuk setiap program kerja pelayanan yang tersaji dalam RAPB. Dengan berjalannya waktu laporan keuangan yang tersaji dapat digunakan untuk proses evaluasi atau pengendalian atas apa yang terjadi dengan rencana yang ada. Dalam proses pengendalian ini kemudian bisa juga disusun strategi baru guna mencapai target yang telah dirumuskan dalam rencana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah:

1. Pengelola gereja/paroki memiliki pemahaman dasar mengenai laporan keuangan, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, menurut yang disyaratkan oleh PSAK 45. ISAK 35 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2020, memiliki beberapa perbedaan dengan PSAK 45, tetapi pengelola gereja/paroki tidak mengenal dan memahami dengan baik laporan keuangan menurut ISAK 35. Pemahaman dasar yang dimaksud adalah informan dapat menyebutkan akun utama dalam tiap-tiap laporan keuangan dan memberikan penjelasan kegunaan elemen dalam tiap-tiap laporan keuangan. Laporan arus kas merupakan pengecualian dalam penelitian ini, karena laporan ini tidak menjadi output dari sistem keuangan online yang disusun oleh otoritas gereja.
2. Dalam hal manfaat, pengelola gereja memiliki kemampuan untuk menggunakan elemen-elemen dalam laporan keuangan sebagai dasar perencanaan saat menyusun RAPB, sebagai informasi untuk melakukan pengendalian sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Beberapa pembuatan keputusan yang tampak saat kondisi pandemi adalah pengalihan

dana untuk mendukung para korban covid-19 seperti obat-obatan, pangan dan bantuan pendidikan, penundaan pengadaan aset, dan kegiatan rutin lain.

3. Belum diterapkannya ISAK 35 atau PSAK 45 secara penuh bukan disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang komponen-komponen laporan keuangan dan kebermanfaatannya tetapi lebih pada belum dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menerapkan ISAK 35. Dengan laporan yang ada saat ini, gereja merasa kebutuhan informasi yang mereka butuhkan sudah tercukupi. Faktor lain yang menjadi penghalang yaitu belum tersedianya catatan-catatan yang dapat diandalkan tentang jumlah dan nilai aset yang saat ini dimiliki gereja.

5.2. Implikasi dan Saran

1. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis mengenai pertanggungjawaban gereja kepada umat melalui teori legitimasi. Laporan keuangan menjadi bentuk tanggung jawab gereja atas donasi umat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi kegiatan rutin dan kegiatan visioner gereja. Donasi ini menjadi bentuk kontrak sosial seperti yang dijelaskan oleh teori legitimasi dan laporan keuangan merupakan cara mengkomunikasikan bahwa kegiatan-kegiatan gereja yang transparan dan akuntabel serta mendukung tujuan keberadaan gereja yang membawa umat pada tata keselamatan.

2. Inventarisasi aset gereja perlu segera dilakukan agar gereja dapat menyesuaikan laporan keuangan yang ada saat ini dengan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35.
3. Otoritas gereja perlu menyelenggarakan workshop sosialisasi standar pelaporan dan teknik analisis laporan keuangan yang memungkinkan para pengelola gereja untuk memahami analisis yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan. Selain itu juga perlu untuk selalu melakukan *update* peraturan yang ada sehingga kebijakan yang diambil bisa sejalan.

STATUS LUARAN

Penelitian ini belum menghasilkan luaran dengan kata lain masih dalam proses penyelesaian laporan.

No	Jenis Luaran	Deskripsi Luaran	Status/Progress Ketercapaian
1	Laporan Penelitian	Laporan penelitian sesuai format laporan LPPM	Selesai

KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian ini terkait dengan masalah perijinan. Pada awal proposal rencana informan adalah pengambil keputusan di tingkat keuskupan, namun karena sedang terjadi pergantian kepemimpinan ekonomat maka pejabat baru belum mengizinkan tim peneliti untuk melakukan wawancara dengan pegawai keuskupan yang terkait dengan pelaporan keuangan paroki.

Berdasarkan kondisi ini maka kemudian tim melakukan perubahan informan tidak pada level pengambil keputusan di keuskupan, tetapi pelaksana kebijakan pelaporan keuangan yaitu Romo Paroki dan Bendahara, selain itu juga menambah informan dari majelis gereja kristen.

RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN

Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan menambah jumlah responden melalui metode survei. Hasil penelitian ini juga bisa diberikan kepada otoritas gereja yang lebih tinggi sehingga dapat dilakukan *update* pedoman teknis bagi paroki-paroki.

DAFTAR PUSTAKA

- Alase, A. 2017. The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5 (2). DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9
- Aziza, Nurna. 2014. Anteseden Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Fainess* Vol 4 No 1 hlm 1-21.
- Bogdan, R. C. and Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*, 5th ed. Boston: Allyn & Bacon.
- Burlea Şchiopoiu A., Popa I., 2013, Legitimacy Theory, in Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Editors Samuel O. Idowu, Nicholas Capaldi, Liangrong Zu, Ananda das Gupta, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, pp.1579-1584,
<http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/333348.html>
- Deegan, C; M Rankin; and J Tobin. 2002. An Examination Of The Corporate Social And Environmental Disclosures Of BHP From 1983-1997: A Test Of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Diviana, Sukma, Rangga Putra Ananto, Wiwik Andriani, Roni Putra, Armel Yentifa, Zahara, dan Azi Siswanto. 2020. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol.15. hlm 113 - 132
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. H. 2012. *How To Design and Evaluate Research In Education*. McGraw Hill.
- Gustani, Pencabutan PSAK 45 dan Penerapan ISAK 35: Dampaknya Terhadap Pelaporan Keuangan Yayasan. Diunduh dari:
<https://www.gustani.id/2021/02/pencabutan-psak-45-dan-penerapan-isak.html#>
- Hilal, A. H. and Alabri, S. S. 2013. Using NVIVO for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal of Education*, Vol 2, Issue 2, Hlm. 181—186.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45: Pelaporan Keuangan Entitas berorientasi Nonlaba. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

- _____. 2020. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba. Jakarta: Salemba Empat.
- Memo Uskup Agung Semarang No: 0459/c/a-4/08 tentang Rekomendasi
- Memo Uskup Agung Semarang No: 1172/C/a-4/17 tentang Rekomendasi Pemakaian Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (PPAP). 2017.
- Munte, Franky Bingky dan Mulia Rahman. 2019. Perlakuan Akuntansi Organisasi Nirlaba Terkait Dengan PSAK 45 Tahun 2017 Pada Gereja HKBP Maranatha. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana Vol 6 No 1. Diunduh dari: <http://ojs.ekonomi-unkris.ac.id/index.php/JABK/article/view/258>
- Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki. 2020. Keuskupan Agung Semarang
- Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (PPAP). 2018. Keuskupan Agung Semarang
- Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP). 2008. Keuskupan Agung Semarang
- Putri, Tantri Sofyana. 2018. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kertanegara Semarang. Diunduh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35383062.pdf>
- Randa, Fransiskus. 2011. Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Studi etnografi pada sebuah Gereja Katolik di Tana Toraja). Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Vol 9 Okt 2011, hlm 59-83. Fakultas Ekonomi UAJ Makassar. Diunduh dari <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31310377/4->
- Shocker AD, Sethi SP. 1973. An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies. *California Management Review*;15(4):97-105. doi:10.2307/41164466
- Surat Keputusan Uskup Agung Semarang No 398/c/a-4/02 tentang Administrasi Keuangan Paroki
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Tim Akuntansi Keuskupan Agung Semarang. Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jadwal

No	Nama Kegiatan	Bulan								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5
1	Pembuatan Proposal									
2	Review Proposal									
3	Revisi Proposal									
4	Koordinasi Pengumpulan Data									
5	Interview Informan									
6	Transkrip Data									
7	Coding									
8	Analisis Data									
9	Penyusunan Laporan Penelitian									
10	Review dan Revisi Laporan Penelitian									

ANGGARAN

BAHAN					
No	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Jml X Satuan	Keterangan
PENGUMPULAN DATA					
No	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Jml X Satuan	Keterangan
1	Transport dalam kota	20	50.000	1.000.000	5 kali
2	Konsumsi informan dan peneliti	30	35.000	1.050.000	5 kali
					2.050.000
ANALISIS DATA (TERMASUK SEWA PERALATAN)					
No	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Jml X Satuan	Keterangan
1	Transkrip Wawancara	20	50.000	1.000.000	
2	Pulsa	4	600.000	2.400.000	6 bulan
..					3.400.000
PELAPORAN DAN LUARAN					
No	Deskripsi	Jumlah	Harga Satuan	Jml X Satuan	Keterangan
1	Kertas	1	42.000	42.000	
2	FC			100.000	
3	Jilid	6	50.000	300.000	
					442.000
TOTAL					5.892.000

Daftar Pertanyaan:

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
STUDI KUALITATIF PERSEPSI PENYELENGGARA GEREJA
TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS ISAK 35**

Daftar Pertanyaan

1.	Umum – pedoman pelaporan yang dimiliki	1. Pemahaman ttg pedoman pelaporan keuangan, baik PTKAP atau PPAP 2. Pemahaman ttg keberadaan isak 35 atau psak 45 sbg standar yang mengatur penyusunan laporan keu non laba 3. Pemahaman ttg isak 35 dan psak 45 yang digunakan sebagai dasar penyusunan PTKAP dan PPAP (kebijakan penyusunan LK KAS) 4. Jenis laporan keuangan yang dilaporkan 5. Pengguna laporan keuangan 6. Berapa lama paroki sdh menerapkan pedoman pelaporan dari KAS?
1.	Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai <i>stakeholder</i> mempersepsikan laporan posisi keuangan seperti yang disyaratkan ISAK 35?	Neraca digunakan untuk apa saja? 1. Terdiri dari apa saja? 2. Bisa melihat apa saja? 3. Digunakan untuk apa saja?
2.	Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai <i>stakeholder</i> mempersepsikan laporan pendapatan komprehensif seperti yang disyaratkan ISAK 35?	Lap penghasilan komprehensif 1. Terdiri dari apa saja? 2. Bisa melihat apa saja? 3. Digunakan untuk apa saja?

3.	Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai stakeholder mempersepsikan laporan arus kas seperti yang disyaratkan ISAK 35?	Laporan arus kas: 1. Terdiri dari apa saja? 2. Bisa melihat apa saja? 3. Digunakan untuk apa saja?
4.	Bagaimana pihak penyelenggara administrasi dan keuangan gereja dan jemaat sebagai stakeholder mempersepsikan kebermanfaatan pelaporan keuangan organisasi nonlaba seperti yang disyaratkan ISAK 35 dalam mendukung misi pelayanan gereja?	Manfaat dilihat dari: 2. Kegunaan untuk perencanaan 3. Kegunaan untuk pengendalian 4. Kegunaan untuk pengambilan keputusan

SURAT TUGAS

Nomor: 00523/B.7.2/ST/FEB/II/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

Nama : Yusni Warastuti, SE., M.Si NIDN : 0627067601
Clara Susilawati, SE., M.Si NIDN : 0612087201
Dr. Monika Palupi M., MM NIDN : 0615117301
Dr. Sansaloni Butar Butar, M.Si., Akt NIDN : 0605076901

Status : Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata

Tugas : Melakukan Penelitian tentang : ***Studi Kualitatif Persepsi Penyelenggara Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis ISAK 35***

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang

Waktu : Tahun Akademik 2020 - 2021

Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,
serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas.



Semarang, 01 Februari 2021

Dekan,

DRS. THEODORUS SUDIMIN, MS
NPP : 058.1.1990.074

Daftar Pertanyaan:

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
STUDI KUALITATIF PERSPEKTIF PENYELENGGARAN GEREJA
TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS ISAK 35**

No	PERTANYAAN
Pertanyaan tentang kondisi saat ini	
1	Bagaimana kebijakan pelaporan keuangan penyelenggara gereja?
2	Apa tujuan dari kebijakan tersebut?
3	Apa saja jenis laporan keuangan yang dilaporkan?
4	Siapa saja pengguna laporan keuangan penyelenggara gereja?
5	Standar apa yang digunakan dalam pedoman penyusunan laporan keuangan?
6	Digunakan untuk apa sajakah pelaporan keuangan penyelenggara gereja? Mohon bisa dengan memberikan contoh riil kasus yang pernah dihadapi
	Perencanaan
	Pengendalian
	Pengambilan keputusan
Pertanyaan mengenai ISAK 35	
7	Apakah mengetahui tentang ISAK 35?
8	Apakah mengetahui tentang manfaat ISAK 35?
9	Apakah mengetahui komponen-komponen laporan keuangan berdasarkan ISAK 35?
10	Apakah mengetahui cara penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35?
11	Telah berapa lama penyelenggara gereja menerapkan pelaporan keuangan gereja berdasarkan ISAK 35?
12	Apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan pelaporan keuangan penyelenggara gereja berdasarkan ISAK 35?
Pertanyaan terkait umpan balik dan masukan	

13	Apakah selama penyelenggara gereja mengirimkan laporan mendapatkan umpan balik? Jika ya, mohon untuk dituliskan bentuk umpan balik yang diterima.
14	Apa yang diharapkan oleh penyelenggara gereja setelah membuat dan mengirimkan laporan keuangan ke otoritas yang lebih tinggi?

LAPORAN PENELITIAN

**STUDI KUALITATIF PERSPEKTIF PENYELENGGARA
GEREJA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS PSAK 45**



Ketua:

[5811999224] YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.

Anggota:

[5811995190] CLARA SUSILOWATI, SE, M.Si

[5811998211] Dr. MONICA PALUPI M., S.E., M.M.

[5811999224] YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.

[5812002251] Dr. SANSALONI BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : Studi Kualitatif Perspektif Penyelenggara Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK 45
2. Ketua Tim
 - a. Nama : YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.
 - b. NPP : 5811999224
 - c. Program Studi : Akuntansi
 - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : yusni@unika.ac.id
3. Anggota Tim
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 4 orang
Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 3.180.000,00

Mengetahui,
Dekan Ekonomi,

Semarang, Januari 2021
Ketua Tim Pengusul

Drs. THEODORUS SUDIMIN, M.S.
NPP : 5811990074

YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.
NPP : 5811999224

Menyetujui,
Kepala LPPM

Dr. Y. TRIHONI NALESTI DEWI, S.H., M.Hum.

Anggota Dosen:

[5811995190]CLARA SUSILOWATI, SE, M.Si, [5811998211]Dr. MONICA PALUPI M., S.E., M.M.,
[5811999224]YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si., [5812002251]Dr. SANSALONI BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Akuntansi - Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 26 Oktober 2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

Studi Kualitatif Perspektif Penyelenggara Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK 45

Dengan catatan review sebagai berikut:

- mohon dilihat pada dokumen 1. latar belakang masalah, kaitan dengan kontribusi penelitian 2. Tambahkan teori untuk fenomena yang akan diteliti 3. Cek kembali fakta-fakta mengenai implementasi sistem akuntansi gereja 4. Cek metodologi
- Hello tim. Sebagai awal penelitian kualitatif, sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang masih harus ditambahkan dalam penelitian ini untuk bisa menjadi "theorised storyline". Silahkan ditambahkan jika memungkinkan. Komentar ada di draft review yang saya sertakan disini. Tk
- Dalam Berita Acara

Reviewer 1

Reviewer 2

ST. VENA PURNAMASARI, S.E., M.Si.

LINGGAR YEKTI NUGRAHENI, SE., MCom.,
Akt., PhD., CA



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia